



PERDA 12/2002 PERLU DISEMPURNAKAN

**Akomodir Kampung, Perkuat Kelembagaan Masyarakat**

YOGYA (KR) - Perencanaan pembangunan perlu ada upaya peningkatan kualitas agar lebih partisipatif dan berkonsep pemberdayaan. Hal itu diimbangi dengan penguatan kelembagaan kemasyarakatan sebagai salah satu pendukung keberhasilan pembangunan yang lebih berkualitas, tepat sasaran dan lebih adil. Sehingga peran kampung pun patut segera diakomodir dalam sistem kelembagaan kemasyarakatan.

Anggota DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi PKS Bambang Anjar Jalumurti, menjelaskan kampung merupakan teritori yang ditetapkan berdasarkan nilai historis dan karakteristik sosial yang khas serta penting sebagai modal pembangunan. "Perda menyangkut pembinaan kelembagaan masyarakat yang ada yakni Perda 12/2002 perlu untuk segera disempurnakan dengan mengakomodir peran kampung," jelasnya.

Dalam perda tersebut, kelembagaan kemasyarakatan hanya sebatas Lembaga Pemberdayaan

**Bambang Anjar Jalumurti  
Fraksi PKS**



KR-Istimewa

Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Padahal di Kota Yogya saat ini juga sudah terbentuk para pengurus kampung. Kampung pun mampu menjadi energi baru dalam sinergi pembangunan dengan lembaga yang su-

dah ada sebelumnya.

Bambang menegaskan, di samping itu pengurus wilayah juga dituntut mengenali potensi wilayahnya dengan baik. Terutama potensi sumber daya maupun yang bersifat tata nilai yang merupakan pengetahuan lokal dan kearifan lokal yang akan menjadi modal sosial bagi pembangunan wilayahnya. "Yang tak kalah penting ialah pembagian peran yang jelas bagi lembaga kemasyarakatan yang ada. Ini akan mendorong optimalisasi sumber daya dan menghindari tumpang tindih serta ego sektoral antarlembaga," urainya.

Oleh karena itu, masa perdisasi antara kelembagaan masyarakat yakni RT, RW, LPMK dan kampung perlu disamakan. Hal ini akan sangat penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Begitu pula menyangkut penguatan dukungan penganggaran di wilayah. Dukungan anggaran dari pemerintah akan menjadi stimulan bagi keswadayaan dan keberdayaan masyarakat. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005